

Strukturasi Peran Bappeda Kota Salatiga dalam Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2021-2022

Wahyuni Dwi Purwanti^{1*}, Suryo Sakti Hadiwijoyo², Daru Purnomo³

^{1,2,3} Prodi Sosiologi, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

Email: wahyunidwip17@gmail.com¹, suryo.hadiwijoyo@uksw.edu²,
daru.purnomo@uksw.edu³

Abstrak

Pemerintah telah merumuskan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (STARNAS) yang terdiri dari lima pilar berfokus pada kebijakan penurunan stunting. Salah satu pilar yakni pilar ketiga berfokus pada konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program kegiatan pusat, daerah hingga desa. Bappeda memiliki peranan sebagai *leading sectors* yang mampu mengkoordinir seluruh komponen agar dapat melaksanakan aksi konvergensi penurunan percepatan stunting. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) mendeskripsikan kondisi stunting di Kota Salatiga. 2) mendeskripsikan implementasi aksi konvergensi percepatan penurunan stunting yang dilakukan oleh Bappeda. 3) menganalisis strukturasi peran Bappeda dalam aksi konvergensi stunting di Kota Salatiga. Peneliti menggunakan teori strukturasi Antoni Giddes untuk menganalisis peran Bappeda dalam aksi konvergensi stunting di Kota Salatiga. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa angka prevalensi stunting di Kota Salatiga pada tahun 2021 mencapai 15,2% hal ini berarti angka prevalensi stunting pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu 6,21. Bappeda sebagai leading sektor dalam aksi konvergensi berperan sebagai perencana dan pengarah dalam menjalankan proses pemerintah di suatu daerah. Bappeda berperan sebagai koordinator dan fasilitator untuk memperlancar pencapaian tujuan dengan memberikan bantuan berupa pelatihan, pengadaan sarana dan prasarana, serta komunikasi.

Kata Kunci : Stunting, Kota Salatiga, Peran Bappeda, Aksi Konvergensi, Strukturasi

Abstract

The government has formulated a National Strategy to Accelerate the Reduction of Stunting (STARNAS), which consists of five pillars focusing on stunting reduction policies. One of the pillars, namely the third pillar, focuses on convergence through coordination and consolidation of central, regional and village activity programs. Bappeda has a role as a leading sector that is able to coordinate all components so that they can carry out convergence actions to reduce stunting acceleration. The aims of this research are 1) to describe the condition of stunting in Salatiga Municipality. 2) describe the implementation of the stunting convergence action in Salatiga Municipality. 3) analyze the structure of the role of Bappeda in the stunting convergence action in Salatiga Municipality. The researcher used Antony Giddes' structuring theory to analyze the role of Bappeda in the stunting convergence action in Salatiga Municipality. This type of research is descriptive qualitative, while the data collection method used is interviews. The results of this study are that the stunting prevalence rate in Satiga Municipality reached 15.2%, this means that the stunting prevalence rate in 2022 has decreased to 6.21. Bappeda as the leading sector in convergence action acts as a planner and director in carrying out government processes in a region. Bappeda acts as a coordinator and facilitator to facilitate the achievement of goals by providing assistance in the form of training, provision of facilities and infrastructure, and communication.

Keywords: *Stunting, Salatiga Municipality, The Role of Bappeda, Convergence Action, Structuration*

PENDAHULUAN

Stunting merupakan salah satu masalah gizi yang krusial yang dihadapi oleh negara-negara miskin dan berkembang. Stunting adalah bentuk kegagalan tumbuh kembang yang menyebabkan kegagalan gangguan pertumbuhan linier pada balita yang diakibatkan oleh kekurangan nutrisi dalam jangka waktu yang lama, yakni sejak waktu kehamilan hingga pada usia 24 bulan (Kartini et al. 2016). Jackson and Cander (2004) menyebutkan bahwa balita yang mengalami kekurangan gizi pada masa pertumbuhannya berimbas pada terhambatnya perkembangan fisik, menurunnya sistem kekebalan tubuh, menghambat perkembangan mental anak bahkan risiko terparah adalah kematian.

Menurut (Purnomo et al. 2021) faktor penyebab tingginya kasus stunting di Salatiga disebabkan oleh pemberian makan pada bayi dan anak yang kurang tepat, pemberian ASI yang tidak eksklusif, kurangnya pengetahuan Ibu/orang tua /pengasuh mengenai gizi seimbang pada balita. Kemudian (Safina et al. 2023) menyebutkan faktor utama penyebab stunting di Salatiga meliputi, pola asuh, akses air bersih dan sanitasi, serta kekurangan gizi kronis, selain faktor utama tersebut terdapat faktor lain yang mempengaruhi yaitu faktor sosial-budaya dan ekonomi. Menurut (Mann and Truswell 2002) penderita stunting akan mengalami gangguan fisik dan mental serta intelektualnya akan terganggu. Balita dibawah 2 tahun yang mengalami gizi buruk memiliki tingkat kecerdasan yang kurang maksimal, balita tersebut juga akan rentan terhadap penyakit yang berisiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara meluas malnutrisi akan menghambat pertumbuhan. Stunting merupakan salah satu indikator yang menunjang keberhasilan kesejahteraan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. Dampak dari stunting sangat luas yang mencakup berbagai dimensi yakni, ekonomi, kecerdasan, kualitas dan dimensi bangsa yang akan berkaitan dengan masa depan anak (Khoeroh and Indrayanti 2017). Maka dari itu stunting tidak hanya berdampak dalam jangka waktu pendek saja namun, stunting akan berdampak dalam jangka waktu panjang (Supriyanti et al. 2021).

Pencegahan stunting perlu dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang. Sehingga saat ini isu stunting telah menjadi perhatian dan fokus pemerintah untuk segera diselesaikan. Agar upaya pencegahan stunting dapat berjalan secara optimal maka dibutuhkan prasyarat yang mendukung meliputi, komitmen politik maupun kebijakan pelaksanaan, peran aktif pemerintah maupun non-pemerintah.

Program percepatan penurunan stunting di Indonesia saat ini masih belum berjalan secara efektif dan efisien, hal ini dapat dilihat dari kurang optimal koordinasi pengadaan intervensi gizi yang spesifik maupun sensitif pada seluruh level berkaitan pada proses perencanaan, anggaran, pemantauan maupun dalam proses evaluasi, selanjutnya dapat dilihat pula pada pemanfaatan alokasi dan sumber daya dan dana yang belum dimanfaatkan secara optimal. Disamping itu masih terbatasnya kapasitas dan kualitas pengadaan program bahkan berkurangnya advokasi maupun sosialisasi berkaitan pada percepatan penurunan stunting. Selain itu, terdapat beberapa hambatan lainnya yang berkaitan dengan implementasi dan kebijakan tingkat lapangan yang kurang optimal ((TNP2K 2018).

Upaya percepatan penurunan stunting akan berhasil dicapai apabila dalam pelaksanaannya dilakukan secara konvergen dari tingkat Kabupaten/Kota hingga masyarakat. Konvergensi menurut *Global Nutrition International* diartikan dengan gerakan yang dilaksanakan terkoordinasi, terintegrasi serta bersama dalam memanfaatkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk menetapkan target atau sasaran keluarga berprioritas stunting dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka upaya mengurangi angka stunting pemerintah telah menata perangkat pelaksanaan percepatan penanggulangan stunting dan menyusun strategi nasional

(STARNAS) 2018-2024 yang mencakup wilayah pusat hingga daerah. Kondisi yang demikian juga berlaku di Kota Salatiga yang menjadi sasaran program penurunan angka stunting.

Tahun 2024 Pemerintah Kota Salatiga telah menetapkan target angka stunting balita dengan zero stunting. Dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah Kota Salatiga menyadari bahwa dibutuhkan sinergitas dalam aksi upaya percepatan pencegahan stunting. Hal tersebut bertujuan agar upaya percepatan penurunan stunting dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan data stunting Kota Salatiga per Februari tahun 2022, jumlah bayi stunting sebanyak 1.099 atau sebesar 9,588% dari total keseluruhan bayi salatiga (Safari et al. 2023). Dengan menurunnya persentase stunting yang demikian, Kota Salatiga diharapkan mampu memberikan kontribusi secara optimal untuk mewujudkan prevalensi menurunnya angka stunting tingkat Nasional sampai periode 2024. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, dimana Bappeda sebagai *leading sector* dalam aksi konvergensi memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai perencana dan pengarah dalam menjalankan proses pemerintah di suatu daerah. Bappeda juga menjembatani antar lembaga dalam melakukan koordinasi masalah stunting.

Penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan teori Strukturasi dari Anthony Giddens, dimana Bappeda pada penelitian ini adalah sebagai aktor dari pemerintah yang bersinggungan dengan aksi konvergensi Stunting di Kota Salatiga. Sehingga Bappeda sebagai aktor dianggap mempunyai kapasitas yang kuat dalam mengelola dinamika dan keberhasilan dalam menjalankan aksi konvergensi stunting sesuai dengan prinsip-prinsipnya.

Hal ini menjadi penting sebagai upaya dalam melihat korelasi dan implementasi kebijakan publik mengenai stunting di Salatiga. demikian melalui penelitian ini, peneliti memfokuskan pada dinamika dan aspek rencana aksi konvergensi stunting di kota Salatiga yang dilakukan oleh Bappeda.

Teori Strukturasi Anthony Giddens

Teori strukturasi menurut pemikiran Giddens (1984) didasarkan pada adanya hubungan antara individu dengan institusi sosial. Teori ini menekankan pada keseimbangan peran antar aktor dalam tatanan sosial. Kemudian teori ini juga menjelaskan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia tersebut pada dasarnya terbatas. Disamping itu, struktur sosial yang ada diciptakan oleh manusia itu sendiri dan manusia juga menjadi penyebab dari perubahan sosial (Giddens 1984). Adapun teori itu memberikan bukti adanya dualitas manusia yaitu struktur maupun agensi yang keduanya saling berkaitan serta tidak bisa dipisahkan, sehingga disebut sebagai "dualitas struktur" (Giddens 1984). Aktor berkemampuan untuk menciptakan struktur masyarakatnya dengan membuat norma, menyusun nilai-nilai, serta merancang penerimaan sosial. Namun, aktor dalam tindakannya dibatasi oleh struktur sosial. Giddens (1984) menjelaskan struktur dengan suatu modalitas, yang terdiri dari tata aturan maupun beragam sumber daya yang menjadi pengendali bahkan memberikan arahan pada tindakan seseorang. Tindakan itu dibatasi dengan aturan, namun sumber daya memberikan fasilitas untuk berbagai tindakan individu (Giddens 1984).

Pada penelitian ini Bappeda merupakan agen yang melakukan perubahan melalui kebijakan dan upaya dalam aksi konvergensi penurunan stunting di Kota Salatiga, dalam melaksanakan kebijakan aksi konvergensi stunting Bappeda membutuhkan kerjasama yang berkesinambungan antar OPD sehingga terciptanya keseimbangan peran aktor.

Konsep Aksi Terintegrasi Intervensi Pencegahan dan Penurunan Stunting

Tim Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting telah merumuskan delapan aksi terkait integrasi guna mencegah dan menurunkan stunting (TNP2K 2018). Aksi tersebut diimplementasikan melalui berbagai kegiatan maupun aksi guna meningkatkan pelaksanaan intervensi gizi penurunan stunting yang mencakup seluruh wilayah. Delapan aksi percepatan penurunan stunting dijabarkan antara lain:

1. Aksi Analisis situasi, aksi ini mempunyai tujuan guna membantu setiap pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk menetapkan programnya yang menjadi prioritas dan memperbaiki manajemen layanan wilayah tersebut dan meningkatkan akses keluarga 1000 HPK secara berkesinambungan pada intervensi gizi spesifik maupun sensitif.

2. Aksi Rencana kegiatan, aksi ini dimaknai sebagai tindak lanjut dari aksi pertama yaitu analisis situasi dengan merealisasikan rekomendasi hasil analisis situasi.
3. Aksi rembug stunting, setiap pemerintah Kabupaten/Kota secara bersama-sama melakukan konfirmasi, sinkronisasi, dan sinergi hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan dari setiap OPD.
4. Aksi Peraturan Bupati/Walikota, peraturan yang menjelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab
5. Aksi Pembinaan KPM (Kader Pembangunan Manusia), kegiatan ini bertujuan guna memberikan kepastian mobilitas pembangunan manusia di seluruh wilayah berjalan dengan baik dengan mengoptimalkan kinerja kader.
6. Aksi sistem manajemen data, pada kegiatan ini bertujuan memastikan terpenuhinya kebutuhan data oleh seluruh OPD serta membantu dan mempermudah masyarakat dalam mengakses data terkait percepatan penurunan stunting.
7. Aksi Pengukuran dan Publikasi Stunting, setelah dilaksanakannya intervensi percepatan penurunan stunting, maka dilaksanakan pengukuran prevalensi stunting pada tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten/kota yang dilakukan secara berkala. Kemudian pengukuran akan dilaporkan melalui tahapan yang diawali dengan posyandu sampai dinas kesehatan Kabupaten/Kota.
8. Aksi Review kinerja tahunan, kegiatan terakhir yaitu evaluasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pencapaian kinerja dari program penurunan stunting. Kegiatan ini juga memuat mengenai perkembangan terkait pelaksanaan rencana untuk mencegah kasus stunting yang sudah disepakati dalam aktivitas rembug stunting, kemudian akan dilakukan pengindetifikasian pembelajaran serta menyusun masukan untuk dijadikan feedback dalam merencanakan maupun menganggarkan aktivitas/program di tahun selanjutnya.

Konsep Konvergensi

Menurut (Husen, Runtuwuu, and Suamelo 2022) pencegahan stunting dapat dilakukan dengan adanya intervensi gizi secara terpadu meliputi intervensi gizi secara spesifik maupun sensitif. Upaya pencegahan stunting dapat berhasil dilakukan melalui cara edukasi kelompok prioritas pada lokasi prioritas pencegahan stunting.

Namun, upaya pencegahan stunting tidak dapat dilakukan oleh salah satu pihak saja, diperlukan upaya konvergen agar pelaksanaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Konvergensi penyampaian layanan memerlukan adanya keterpaduan dalam upaya merencanakan, menganggarkan, maupun memantau aktivitas/program pemerintah dengan lintas sektor untuk memastikan masing-masing layanan intervensi gizi secara spesifik pada keluarga sasaran prioritasnya maupun intervensi gizi secara sensitif bagi seluruh kelompok masyarakatnya termasuk masyarakat miskin. Konvergensi diartikan sebagai pendekatan intervensi yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinir, dan bersama-sama dalam target sasaran wilayah geografisnya serta keluarga prioritas supaya melakukan pencegahan terhadap stunting.

Upaya penyelenggaraan intervensi dengan konvergen dilaksanakan melalui penggabungan sumber daya di wilayah prioritas guna mewujudkan tujuannya. Upaya konvergen dapat terwujud jika program daerah mengenai pencegahan stunting dilakukan terpadu maupun terintegrasi sesuai dengan kewenangan lalu layanan dari masing-masing intervensi gizi secara spesifik maupun gizi sensitifnya tersedia serta dapat diakses oleh masyarakat yang memerlukan, termasuk keluarga 1.000 HPK (ibu menyusui, ibu hamil, anak usia 0-23 bulan) (Supriyanti et al. 2021). Sehingga kelompok sasaran yang menjadi prioritas stunting memperoleh manfaat dari adanya layanan.

Kegiatan konvergensi percepatan untuk mencegah kasus stunting dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu, perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pemantauan serta evaluasi (Permatasari et al. 2020). Tahap pertama yakni perencanaan, suatu konvergensi difokuskan dengan penajaman kegiatan perencanaan maupun anggaran reguler yang basisnya data serta informasi faktual. Sehingga program maupun aktivitas yang telah dirancang lebih tepat

sasaran meliputi kegiatan: (i) melaksanakan analisis situasi awal; (ii) melaksanakan rembug stunting; serta (iii) menyusun rencana kerja. Analisis situasi awal maupun rembug stunting dilaksanakan untuk mengetahui keadaan stunting pada wilayah kabupaten/kota, selain itu juga diketahui penyebab utama stunting, serta identifikasi program yang selama ini telah terlaksana. Melalui analisis tersebut diharapkan bisa ditetapkan program/kegiatan, sumber pendanaan, kelompok sasaran, dan dapat mengidentifikasi lokasi prioritas percepatan untuk pencegahan kasus stunting, selanjutnya analisis itu diterjemahkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Organisasi Perangkat daerah (OPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Memasuki proses pelaksanaan, konvergensi difokuskan dengan melakukan intervensi gizi secara spesifik serta sensitif yang dilakukan terpadu dan bersama di lokasi sebagaimana yang sudah ditetapkan, selain itu juga dapat mendorong pemanfaatan dana desa guna melakukan percepatan pencegahan stunting maupun mobilisasi Kader Pembangunan Manusia (KPM). Sementara dalam tahap pemantauan maupun evaluasi, konvergensi dilaksanakan dengan proses pelaksanaan pemantauan secara bersama melalui serangkaian mekanisme serta indikator yang dikoordinasikan dengan baik serta berkelanjutan, dengan demikian hasil pemantauan maupun evaluasi dipergunakan sebagai acuan dasar untuk seluruh pihak terkait agar mengetahui perkembangan dari pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Selanjutnya evaluasi ini juga dapat memberikan masukan bagi tahap perencanaan selanjutnya (Permatasari et al. 2020).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer yaitu wawancara dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan upaya aksi konvergensi pencegahan stunting Kota Salatiga tahun 2021-2022. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dijadikan informan pada penelitian meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA), Dinas Kesehatan, Kelurahan, dan masyarakat selaku penerima manfaat. Teknik analisis data berdasarkan teori (Sugiyono 2015) antara lain reduksi, penyajian data serta melaksanakan verifikasi data.

HASIL PEMBAHASAN

Dinamika Stunting Kota Salatiga

Permasalahan Stunting di Kota Salatiga terjadi hampir di seluruh kelurahan, yang mana lokus stunting Kota Salatiga pada tahun 2021 mencakup 7 wilayah, yaitu kelurahan Mangunsari, Tegalrejo, Dukuh, Sidorejo Kidul, Kutowinangun Lor, Kecandran, dan Randuacir (Safani et al. 2023).

Tabel 1. Sebaran Prevelensi Stunting Kota Salatiga Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah Balita	Jumlah Balita Stunting
Sidomukti	2.301	147
Argomulyo	3.125	316
Sidorejo	2.780	218
Tingkit	2.583	249
Kota Salatiga	10.789	930

Sumber: Purnomo et al. 2021 (telah diolah)

Pada Tabel 1. Menunjukkan sebaran angka prevelensi stunting setiap kecamatan Kota Salatiga tahun 2021. Malalui tabel tersebut dapat dilihat di tahun 2021 kasus stunting tertinggi berada di Kecamatan Argomulyo dengan jumlah 316 kasus.

Tabel 2. Sebaran Prevalensi Stunting Kota Salatiga 2022

Kecamatan	Jumlah Balita	Jumlah Balita Stunting
Argomulyo	3.176	118
Sidomukti	2.276	146
Tingkir	2.526	143
Siderejo	2.556	154
Jumlah	10.534	561

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Salatiga tahun 2022

Pada tabel 2. Menunjukkan sebaran angka prevalensi setiap kecamatan Kota Salatiga tahun 2022. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kecamatan Siderejo merupakan kecamatan yang memiliki angka prevalensi stunting paling tinggi diantara kecamatan lainnya yaitu sebesar 154 kasus. Sebelumnya pada tahun 2021 angka prevalensi stunting Kota Salatiga mencapai 15,2% hal ini berarti angka prevalensi stunting pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu 6,21%. Prevalensi stunting Kota Salatiga masih berada di bawah angka prevalensi stunting Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 20,9%.

Implementasi Aksi Konvergensi Stunting di Kota Salatiga

Upaya pencegahan stunting akan lebih efektif apabila program intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dilakukan secara konvergen (Picauly 2021). Konvergensi layanan membutuhkan keterpaduan proses perencanaan, penganggaran, dan pemantauan, program/kegiatan pemerintah secara lintas sektor untuk memastikan ketersediaan layanan intervensi gizi spesifik kepada keluarga prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk seluruh masyarakat terutama masyarakat miskin (Picauly 2021). Terdapat 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting yaitu; 1 melaksanakan analisis situasi 2, rencana kegiatan 3, penurunan stunting dilakukan bersama-sama melalui rebug stunting 4, pembentukan peraturan Bupati/Walikota tentang pencegahan stunting 5, pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) 6, manajemen data 7, pengukuran dan publikasi stunting 8, evaluasi atau review kinerja tahunan (Yuliana, Nuru, and Kando 2022)

Aksi konvergensi merupakan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan bersama-sama dengan tujuan untuk mencegah stunting pada sasaran prioritas. Konvergensi dilakukan mulai dari penyalarsan rencana, penggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan lintas sektor pada berbagai tingkat pemerintah (Permatasari et al. 2020).

Bappeda memiliki peran yang sangat penting dalam aksi konvergensi percepatan penurunan stunting mengingat bahwasanya Bappeda berperan sebagai *Leading Sector* dan koordinator dalam pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting, dimana hal ini dilatarbelakangi oleh posisi Bappeda sebagai perencana dan pengarah dalam menjalankan proses pemerintah di daerahnya masing-masing. Selain itu, Bappeda dinilai mampu menemukan jalan untuk memudahkan berkoordinasi antar Lembaga-lembaga pemerintah yang dinaunginya.

Sebagaimana yang telah tercantum dalam Perpres Nomor 27 tahun 2021 yang menyatakan dalam intervensi pencegahan stunting seluruh OPD yang terkait dalam aksi pelaksanaan percepatan penurunan stunting wajib untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mendukung program prevalensi stunting sesuai dengan arahan Wakil Presiden. Secara implisit aksi konvergensi bappeda Kota Salatiga meliputi perencanaan, monitoring, dan evaluasi.

1. Perencanaan

Pelaksanaan aksi konvergensi dimulai dari langkah penyusunan rencana. Perencanaan mencakup tiga aksi, mulai dari aksi analisis situasi, penyusunan rencana

kegiatan, dan rembuk stunting. Perencanaan program diharapkan dapat meningkatkan kesesuaian antara permasalahan yang ada di masyarakat dengan kesediaan program yang ada sehingga dapat meningkatkan percepatan penurunan stunting di Kota Salatiga. Menurut Kabid Perencanaan Kesra Bappeda (2023) sebelum melakukan kegiatan perencanaan maka dilakukan analisis situasi dengan harapan dapat mengidentifikasi sebaran prevalensi stunting, situasi ketersediaan program, dan praktik penyampaian. Mengacu pada data SSGBI dan Riskesdas, angka stunting balita nasional sejak periode 2019 yakni 27,7% terjadi penurunan 3,1% dari pada periode 2018. Pemerintah Pusat menentukan target angka stunting balita di periode 2024 sebesar 14% (bapelitbangda 2021). Untuk itu, diperlukan sinergitas koordinasi upaya percepatan penurunan stunting agar konvergen, baik pada perencanaan dan pelaksanaan.

2. Monitoring dan Evaluasi

Bappeda memberikan dukungan teknis kepada seluruh OPD terkait yang telah ditunjuk untuk melaksanakan seluruh kegiatan dan program intervensi yang telah ditetapkan. Bappeda bertanggungjawab untuk melakukan perbaikan dan memberikan arahan perbaikan kebijakan yang diperlukan. Bappeda selalu aktif dalam memberikan dukungan teknis terhadap pelaksanaan intervensi. Bappeda melaksanakan rapat koordinasi dengan tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan mengenai pelaksanaan program-program percepatan penurunan stunting. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Bappeda Kota Salatiga, tentang Evaluasi pelaksanaan program konvergensi stunting diperoleh informasi bahwa tidak ada rapat koordinasi khusus yang dilaksanakan untuk mengevaluasi apakah program percepatan penurunan stunting yang dilakukan oleh masing-masing OPD dapat terealisasi atau tidak. Salah satu bentuk evaluasi yang dapat dilakukan selain menghitung realisasi program adalah menerima kepuasan penerima pelayanan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan informan merasa bahwa kegiatan yang dilakukan oleh kader melalui kegiatan posyandu balita sudah baik. Dimana informan menyatakan bahwa mereka sudah merasakan manfaat dari program yang mereka terima. Namun, informan juga menurunkan bahwa program yang mereka terima tidak ada perbedaan dengan tahun sebelumnya. Hal ini berarti program belum ada perbaikan secara signifikan dari tahun sebelumnya.

Upaya untuk mempercepat penurunan stunting sudah menjadi program prioritas terkait pembangunan Kota Salatiga seperti tertuang pada Perda Kota Salatiga No. 27 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Pemerintah kota Salatiga telah menargetkan prevalensi stunting dapat diturunkan hingga 0% atau zero stunting pada tahun 2024. Menurut wawancara yang dilakukan kepada Kabid Perencanaan Kesra Bappeda tahun 2023, pemerintah Kota Salatiga telah melaksanakan 8 aksi konvergensi sejak tahun 2021, dan berbagai program lintas sektor sudah diintegrasikan pada delapan aksi konvergensi terkait percepatan penurunan stunting, aksi tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis Situasi: menjadi tahap awal penentu lokasi prioritas maupun intervensi spesifik serta sensitif yang hendak dilaksanakan. Berdasarkan analisis stunting, Kota Salatiga menentukan lokasi fokus percepatan penurunan stunting di 7 kelurahan yaitu kelurahan, Tegalrejo, Mangunsari, Sidorejo Kidul, Kutowinangun Lor, Dukuh, Randuacir dan kelurahan Kecandran. Pada analisis tersebut, dilaksanakan identifikasi terkait kendala untuk memberi suatu layanan bagi sasaran rumah tangga melalui 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebagai penentu rekombinasi baik ditinjau dari sisi lokasi, anggaran, koordinasi, layanan, maupun perencanaan kegiatan.
2. Penyusunan Rencana Kegiatan: adanya komitmen pemerintah Kota Salatiga pada penurunan kasus stunting yang terlihat dari suatu alokasi anggaran, dimana pada 2021 Kota Salatiga telah mengalokasikan anggaran pendukung penurunan stunting sebesar 42,291 miliar atau 10,59% dari belanja barang dan jasa. Guna memastikan intervensi tersebut terlaksana secara efektif dan tepat sarannya, maka telah dilakukan monitoring terpadu pada tujuh kelurahan tahun 2021 sekaligus untuk memotret kendala maupun masalah yang ditemui pada upaya percepatan terhadap penurunan stunting yang ada di masing-masing kelurahan.

3. Rembug Stunting: pelaksanaan rembug stunting dilakukan 28 oktober tahun 2021 bertepatan pada hari sumpah pemuda (Bappeda 2021). Adapun acara rembug stunting termasuk acara rutin tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Salatiga yang menjadi usaha percepatan penurunan stunting balita pada Kota Salatiga. Selanjutnya acara itu dilakukan melalui penandatanganan komitmen bersama dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kota Salatiga bagi seluruh OPD mulai dari pemerintah kota hingga perangkat desa. Pelaksanaan rembug stunting sudah dimuat di dalam media elektronik yang didokumentasikan pada web Bappeda Kota Salatiga.
4. Peraturan Walikota: Menindak lanjuti Perpres Nomor 27 Tahun 2021, melalui Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 050-05/156/2022, Pemerintah Kota Salatiga membentuk tim konvergensi percepatan stunting yang terdiri atas, 1, pengarah 2, pelaksana 3, Bidang-bidang 4, sekretariat dan pakar yang tersusun sebagai keanggotaan. Tujuan pelaksanaan aksi konvergensi dilakukan bersama-sama bagi semua OPD yakni melakukan berbagai program terkait bagi setiap OPD untuk dapat mewujudkan percepatan penurunan stunting dengan adanya kebijakan yang konvergensi.
5. Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM): peran Kader Pembangunan Manusia pada level desa sangatlah vital, hal ini dikarenakan kader merupakan salah satu aktor yang secara langsung bersentuhan dengan keluarga berisiko stunting serta keluarga bersama balita stunting. Mekanisme pelaksanaan pembinaan KPM dilaksanakan dengan menyelenggarakan pertemuan sosialisasi berkaitan dengan Aksi Konvergensi percepatan penurunan stunting dan menghadirkan beberapa narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) dan Dinas Kesehatan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan Kualitas terkait permasalahan stunting. Pada tahun 2022 seluruh kelurahan dengan lokus stunting telah memiliki KPM. Untuk operasi KPM sendiri telah dialokasikan anggaran transportasi dan operasi yang dialokasikan dari dana desanya maupun kelurahan.
6. Manajemen Data: Pemerintah kota Salatiga terus mendukung peningkatan terhadap kualitas data antara lain data prevalensi stunting ditingkatkan keakuratannya melalui peningkatan kunjungan balita di posyandu, tera ulang antropometri, maupun refreshing kader Posyandu tentang tata cara terkait penimbangan serta pengukuran berat badan yang dilakukan dengan benar. Selain itu pemerintah juga melakukan koordinasi antara Perangkat Daerah yang mempunyai data cakupan yang sama supaya dijadikan acuan maupun penentu intervensi.
7. Pengukuran dan Publikasi Stunting: menjadi bentuk keberlanjutan monitoring terkait proses percepatan penurunan stunting. Adapun pengukuran balita dilaksanakan rutin pada masing-masing Posyandu di kelurahan. Mengacu pada operasi timbangan, sebagai bentuk transparansi, informasi dan edukasi pada masyarakat, kasus stunting maupun prevalensi di masing-masing kelurahan dilaporkan oleh kader serta di unggah ke website Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Kota Salatiga menjadi bentuk publikasi pada masyarakat berbasis spasial atau kewilayahan yang bisa diakses kapan dan dimana saja (Purnomo et al. 2022). Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak balita di posyandu dilakukan rutin setiap bulan sekali oleh tenaga kesehatan dan dibantu oleh kader Posyandu dan KPM. Aksi ini dilakukan untuk memperoleh data prevalensi stunting terkini pada skala pelayanan puskesmas, kecamatan, dan kelurahan. Untuk pengukuran dan publikasi stunting KPM petugas posyandu berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Salatiga. Data pengukuran tinggi badan balita di input oleh KPM melalui perangkat lunak *microsoft excel*.
8. Review kinerja tahunan: dalam dokumen Bapenas (2018) menyebutkan bawah Sekertariat daerah dan Bappeda Kabupaten/Kota bertanggung jawab penuh atas aksi konvergensi. Sekda bertanggung jawab untuk memimpin dan mensupervisi proses dan hasil review kemudian Bappeda bertanggung jawab untuk mengkoordinasi penyiapan materi review.

Dalam pelaksanaan review, maka harus dibentuk “Tim pelaksana review kinerja” yang kegiatannya melibatkan seluruh OPD untuk bertanggung jawab menyediakan intervensi gizi spesifik dan sensitif.

Strukturasi Peran Bappeda Dalam Aksi Konvergensi Stunting di Kota Salatiga.

Agensi adalah kemampuan manusia yang ditentukan melalui tindakan manusia dan kemudian kegiatan tindakan tersebut membuahkan hasil. Tindakan menurut (Giddens 1984) memiliki tiga elemen, antara lain pemantauan refleksif, rasionalisasi serta motivasi. Masing-masing elemen mempunyai peran yang spesifik pada semua proses aksi. Giddens menjelaskan teori strukturasi dengan adanya identifikasi hubungan antar individu maupun institusi sosial. Teori strukturasi menempatkan keseimbangan peran dari aktor (manusia) pada masing-masing tatanan sosial. Teori tersebut membuktikan eksistensi dualitas manusia antara struktur dengan agensi. Keduanya berkaitan satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Giddens menjelaskan struktur dengan modalitas, berupa tata aturan maupun sumberdaya yang menjadi pengendali tindakan seseorang. Sedangkan agensi merupakan elemen mendasar untuk menciptakan perubahan.

Dalam penelitian ini Bappeda merupakan agen yang terlibat dalam aksi konvergensi percepatan penurunan stunting Kota Salatiga, dimana Bappeda berperan sebagai *leading sector* dan koordinator dalam pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting. Selain itu, Bappeda dinilai mampu menemukan jalan untuk memudahkan berkoordinasi antar Lembaga-lembaga pemerintah yang dinaunginya. Aksi konvergensi percepatan penurunan stunting tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada keseimbangan peran dan keterlibatan tatanan sosial. Sehingga keterlibatan agen tentunya tidak terlepas dari seluruh OPD yang bertugas dalam aksi konvergensi. Bappeda sebagai agen dalam melakukan aksinya senantiasa bekerjasama dan berkoordinasi dengan seluruh OPD untuk melaksanakan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting Kota Salatiga mulai dari analisis situasi hingga evaluasi kinerja. Peran yang dilakukan oleh Bappeda selaku agen dalam upaya pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting yaitu dengan mendorong program-program kegiatan konvergensi yang disusun oleh OPD, memfasilitasi program-program percepatan penurunan stunting, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, menyelenggarakan kerjasama dengan pemangku kepentingan, dan melakukan evaluasi aksi percepatan penurunan stunting apakah aksi tersebut sudah berjalan dengan baik.

Tindakan dan kegiatan yang dihasilkan oleh Bappeda dalam aksi konvergensi stunting merupakan kemampuan yang menentukan Bappeda sebagai agensi. Kemudian tindakan tersebut didukung dengan seperangkat tata aturan yang telah ditetapkan sebagai modalitas untuk mengendalikan tindakan dan kegiatan dalam aksi konvergensi stunting. Sehingga Bappeda sebagai aktor dianggap mempunyai kapasitas yang kuat dalam mengelola dinamika dan keberhasilan dalam menjalankan aksi konvergensi stunting sesuai dengan prinsip-prinsipnya.

Pada penelitian ini Bappeda merupakan agen yang melakukan perubahan melalui kebijakan dan upaya dalam aksi konvergensi penurunan stunting di Kota Salatiga, dalam melaksanakan kebijakan Bappeda membutuhkan kerjasama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait sehingga membentuk keseimbangan peran aktor.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Permatasari et al. 2020) penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten Prioritas yang melibatkan sektor kesehatan dan non kesehatan melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam aksi konvergensi percepatan penurunan stunting Bappeda berperan dalam mengarahkan pelaksanaan program pencegahan stunting, yang mana Bupati/Wali Kota sebagai penanggung jawab program dari aksi percepatan penurunan stunting

SIMPULAN

Angka prevalensi stunting di Kota Salatiga pada tahun 2021 mencapai 15,2% hal ini berarti angka prevalensi stunting pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu 6,21%.

Prevalensi stunting Kota Salatiga masih berada di bawah angka prevalensi stunting Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 20,9%. Dalam aksi konvergensi percepatan penurunan stunting Bappeda berperan sebagai koordinator dan fasilitator untuk memperlancar pencapaian tujuan dengan memberikan bantuan berupa pelatihan, pengadaan sarana dan prasarana, serta komunikasi. Berdasarkan temuan penelitian maka diperlukan sosialisasi secara masif dan menyeluruh di seluruh wilayah Salatiga terhadap seluruh sektor agar dapat menerapkan program kerjanya masing-masing secara lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda. 2021. “‘Rembug Stunting’ Dalam Rangka Pencegahan & Percepatan Penurunan Stunting.” Bappeda.salatiga.go.id.
- Giddens, A. 1984. *The Constitution of Society: The Outline of the Theory of Structuration*. Cambridge: Polity Press.
- Husen, Amran, Prince Charles Heston Runtuwuwu, and Muhlis Suamelo. 2022. “Mencegah Stunting Melalui Program Intervensi Sensitif.” *Jurnal Pengabdian Khairun* 1(1): 33–47.
- Jackson, Alan A., and Philip C. Cander. 2004. *Handbook of Nutrition and Immunity (Severe Undernutrition and Immunity)*. Toyawa, NJ: Humana Press. <https://doi.org/10.1007/979-1-59259-790-1>.
- Kartini, Apoina et al. 2016. “Kejadian Stunting Dan Kematangan Usia Tulang Dada Anak Usia Sekolah Dasar Di Daerah Pertanian Kabupaten Brebes.” *jurnal kesehatan masyarakat* 11(2): 97–103.
- Khoeroh, Hikmatul, and Dyah Rini Indrayanti. 2017. “Evaluasi Pelaksanaan Gizi Balita Stunting Di Wilayah Kerja Pukesmas Sirampog.” *Unnes Journal of Public Health* 6(3): 190–95.
- Mann, J., and A. S Truswell. 2002. *Essentials of Human Nutrients*. New York: Oxford University Press.
- Permatasari, Yurista et al. 2020. “Tantangan Implementasi Konvergensi Pada Program Pencegahan Stunting Di Kabupaten Prioritas.” *media penelitian dan pembangunan kesehatan* 30(4): 315–28.
- Picauly, Intje. 2021a. “Pengaruh Pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting Terhadap Cakupan Program Intervensi Gizi Sensitif Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.” *Jurnal Pazih-Pergizi Pangan DPD NTT* 10(1).
- . 2021b. “Pengaruh Pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting Terhadap Cakupan Program Intervensi Gizi Sensitif Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.” *Jurnal Pazih-Pergizi Pangan DPD NTT* 10(2).
- Purnomo, Daru et al. 2021. “Pendampingan Dan Penguatan Masyarakat Dalam Pencegahan Stunting Melalui Pembelajaran Lapangan Terpadu.” *Jurnal Pengabdian masyarakat* 2(2): 214–44.
- . 2022. “Pendampingan Dan Peningkatan Kualitas Rumah Data Kependudukan Dan Informasi Di Kampung KB Akrab Kelurahan Tingkir Lor Kota Salatiga Tahun 2022.” *Jurnal pengabdian masyarakat* 3(1): 170–82.
- Safina, Shafa widad et al. 2023. “Kasus Stunting Sebagai Salah Satu Tantangan Pembangunan Kota Salatiga.” *Jurnal Majalah Geografi Indonesia* 37(1): 76–83.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&B*. ed. ALFABETA. Bandung.
- Supriyanti, Nani, Agustin Rahayu, Andiani, and Suryani Mansur. 2021. “Kolaborasi Cegah Stunting Dengan Mempersiapkan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) Pada Masyarakat Di Wilayah Kerja Pukesmas Perawatan Jambula.” *Jurnal BIOSANTIEK* 3(2).
- TNP2K. 2018. *Panduan Konvergensi Program Atau Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting*. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Yuliana, Hasanudin Nuru, and Berlian Kando. 2022. “Kejadian Stunting Berhubungan Dengan 8 Aksi Konvergensi.” *Jurnal keperawatan Silampari* 6(1).